

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974  
TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN DALAM MEMBERANTAS  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 303  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(Studi Kasus Perkara No.323/Pid.B/2010/PN.Sby.)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**SHAFAREZA ERVIANSYAH ADHINEGARA**  
**NPM. 0671010012**

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG  
PENERTIBAN PERJUDIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA**

**(Studi Kasus Perkara No.323/Pid.B/2010/PN.Sby)**

**Disusun Oleh :**

**SHAFAREZA ERVIANSYAH ADHINEGARA**  
**NPM. 0671010012**

**Telah Dipertahankan Dihadapan Dan Dietrima Oleh Tim Penguji Skripsi Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada tanggal : 27 Juni 2011**

**TIM PENGUJI**

**TANDA TANGAN**

**Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM.**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

**:** ( )

**Sutrisno, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

**:** ( )

**Subani, SH., M.Si.**  
**NIP. 19510504 198303 1 001**

**:** ( )

**Mengetahui,  
DEKAN**

**Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM.**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974  
TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN DALAM MEMBERANTAS  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
Studi Kasus Perkara No.323/Pid.B/2010/PN.Sby.**

**Disusun oleh :**

**SHAFAREZA ERVIANSYAH ADHINEGARA**  
**NPM. 0671010012**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi**

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

**Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn**  
**NPT. 3 7507 07 0226**

**Mengetahui**  
**DEKAN**

**Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM.**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penyusun mengambil judul : **Efektivitas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Studi Kasus Perkara No.323/Pid.B/2010/PN.Sby.**

Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Di samping itu dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum dalam mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Sudarto, MP., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku WADEK I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Dosen Pembimbing Utama

yang selalu memberi kemudahan dan solusi kepada penulis serta selalu ramah dalam menjawab pertanyaan maupun memberikan saran kepada mahasiswa/i terutama penulis.

4. Bapak Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Subani S.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan dukungan, masukan, dan kesabaran dalam memberikan pengarahan terhadap penulis.
7. Bapak Eko Wahyudi, S.H., Bapak Fauzul Aliwarman, S.Hi., M.Hum., serta Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn. dan Ibu Mas Anienda F. S.H., MH. Yang selalu bersikap fleksibel dan tidak terkesan formil kepada mahasiswa/i sehingga menjadikan penulis lebih terbuka dalam berkomunikasi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen program studi Ilmu Hukum dan seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Bapak Soetomo, SH., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Ketua Kongres Advokat Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan konsultasi.
10. Bapak Nelson Pasaribu, SH. MH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah member kesempatan kepada peneliti dalam melakukan wawancara.

11. Kedua Orang tuaku, yakni H. Soegeng Ernest Boedhyono, SH. dan Viviane Connie Halatoe yang selalu memberikan bantuan, doa, saran, dan kritik, serta dukungan disetiap langkah yang penulis kerjakan.
  12. Teman dan Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2006 dan 2007, Argo Krisinaranto (Jemblong), Ardi Nugrahanto (Mbote), Ari Handoko (Bori), Rey Kristiansyah (Rempong), Ricky Herdian (Blunter), Ressa Wahyu Widayat Jati (Punk), Dimas Rahmat Prastika (Apotek), Sigit Purnomo (Kelenk), Gede Nengah Tulus (Kuli), yang telah memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  13. Mbak Dian dan Mbak Diah (Bunda) pemilik kantin Fakultas Hukum tempat penulis melakukan refreshing disaat gundah.
  14. Spesial untuk Ditantia Ajeng Saraswati yang selalu memberi dukungan penuh dalam segala hal positif.
  15. Serta teman-teman mahasiswa/i Universitas Pembangunan nasional “Veteran” Jawa Timur selain Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
- Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih kurang sempurna, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini selanjutnya.

Surabaya, Juni 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI</b>	
<b>SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	3
1.3.Tujuan Penelitian .....	4
1.4.Manfaat Penelitian .....	4
1.5.Kajian Pustaka .....	5
1.6.Metodologi Penelitian Hukum .....	11
<b>BAB II       EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974</b>	
<b>TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN JIKA DIKAITKAN</b>	
<b>DENGAN PASAL 303 KUHP</b>	
2.1.Tindak Pidanan Perjudian .....	17

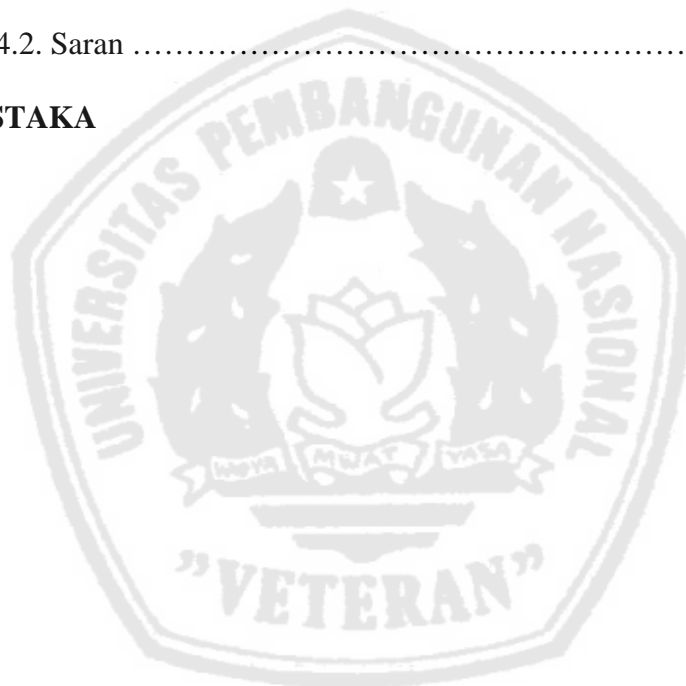
2.2.Pengertian Perjudian Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian .....	21
2.3.Pengertian Perjudian Menurut Pasal 303 KUHP .....	22
2.4.Latar Belakang Tindak Pidana Perjudian dan Tindak Pidana Ringan Menjadi Kejahatan .....	23
2.4.1.Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Tindak Pidana Perjudian dan Akibat Yang Ditimbulkan ....	23
2.4.2.Pengaturan Hukum terhadap Perjudian .....	28
<b>BAB III PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN</b>	
3.1.Penerapan Sanksi .....	39
3.1.1.Penerapan Sanksi Berdasarkan Aturan Hukum .....	39
3.2.Sanksi Pidana Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian .....	43
3.2.1.Pertanggungjawaban Pidana .....	43
3.2.2.Perbuatan Pidana .....	46
3.3.Usaha-usaha Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Serta Hambatannya Dalam Menanggulangi Perjudian .....	47
3.3.1.Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian .....	47



3.2.2. Penanggulangan Terhadap Perjudian .....	49
3.4. Kasus Tindak Pidana Perjudian Perkara	
No.323/Pid.B/2010/PN.Sby .....	51
3.5. Analisa Kasus Tindak Pidana Perjudian Perkara	
No.323/Pid.B/2010/PN.Sby .....	56
<b>BAB IV      PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	57
4.2. Saran .....	58

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shafareza Erviansyah Adhinegara  
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya/ 8 Oktober 1988  
NPM : 0671010012  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Pandugo Baru XII/27 Wisma Penjaringan Sari blok L.18  
Rungkut, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul : “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA STUDI KASUS PERKARA No.323/Pid.B/2010/PN.Sby” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya ciptaan saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka, saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,  
KAPROGDI

Surabaya,      Juni 2011  
PENULIS

Subani, SH., M.Si.  
NIP. 19510504 198303 1 001

Shafareza Erviansyah A.  
NPM. 0671010012

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Shafareza Erviansyah Adhinegara  
NIP : 0671010012  
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 8 Oktober 1988  
Program Studi : Strata 1 (S1)  
Judul Skripsi :

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG  
PENERTIBAN PERJUDIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA  
(Studi Kasus Perkara No.323/Pid.B/2010/PN.Sby)**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kasus Tindak Pidana Perjudian. Tindak Pidana Perjudian telah diatur jelas oleh Pemerintahan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan dijelaskan dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif.

Pembahasan dalam skripsi ini menganalisa tentang efektivitas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam memberantas tindak pidana perjudian yang mengkaji kaitannya dengan pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak Pidana Perjudian merupakan Tindak Pidana Ringan, tapi bisa menimbulkan Tindak Pidana Kejahatan yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor Tindak Pidana Perjudian.

Perlu adanya partisipasi dari masyarakat dalam membantu memberantas perjudian, selain dari Pemerintah ataupun Aparat Keamanan.

***Kata Kunci : Penerapan sanksi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, Tindak Pidana Perjudian.***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah.**

Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Oleh karenanya tidak salah jika aparat kepolisian bertekad untuk memberantas tindak pidana perjudian, selain itu dengan merubah ketentuan sanksi mengenai tindak pidana perjudian merupakan suatu bukti kesungguhan dari pemberantasan perjudian.

Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar dan sebagian masyarakat juga menganggap sebagian perjudian adalah suatu seni budaya, dan tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memperihatinkan, disinyalir tempat perjudian mempunyai pengawasan dari oknum aparat keamanan. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai pengaruh yang negatif dan

merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.<sup>1</sup>

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya pengaruh-pengaruh negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Dengan demikian perjudian menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.<sup>2</sup>

Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.<sup>3</sup> Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Perihal perjudian diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 *bis* Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yang kemudian dengan diundangkannya Undang-undang

---

<sup>1</sup> Bambang Sutiyoso, "Perjudian Dalam Perspektif Hukum", [www.google.com](http://www.google.com), 10 November 2010.

<sup>2</sup> B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980, hal. 352-353

<sup>3</sup> *Ibid.* h. 354

nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disingkat UU Penertiban Perjudian). Menurut Pasal 1 UU Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang diberi judul "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA".

### **1.2. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ?
- b. Bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dikaitkan dengan pasal 303 KUHP ?

### **1.3. Tujuan Penelitian.**

Untuk mengetahui dan menganalisis UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian masih efektif atau tidak dalam memberantas tindak pidana perjudian. Dan bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dikaitkan dengan pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

#### **1.4. Manfaat Penelitian.**

##### **a. Manfaat Teoritis :**

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani perjudian yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam menanggulangi perjudian.

##### **b. Manfaat Praktis :**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani perjudian dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani perjudian.

#### **1.5. Kajian Pustaka.**

##### **a. Pengertian Efektivitas.**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Jadi pengertian efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan/disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan.<sup>4</sup>

**b. Pengertian Penertiban.**

Penertiban dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti proses, cara, atau untuk melakukan menertibkan. Yang bisa diartikan dengan merubah sesuatu untuk menjadi lebih tertib.<sup>5</sup>

**c. Tindak Pidana.**

Tindak pidana itu ialah perbuatan, yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggung jawabkan.<sup>6</sup>

Peristiwa Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga siapa

<sup>4</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 112

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 274

<sup>6</sup> I.C.T Simorangkir, *Peladjaran Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Gunung agung, 1962, h. 225



yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>7</sup>

#### **d. Penegakan Hukum Pidana.**

Menurut Soerjono Soekanto, arti penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dan berperilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.<sup>8</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk Undang-undang yang berupa ide tau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>9</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat diasumsikan bahwa penegakan hukum pidana adalah proses perwujudan norma-norma hukum, untuk dapat menjadi pribadi berperilaku sesuai hukum yang berlaku.

#### **e. Tindak Pidana Perjudian.**

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, namun perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

<sup>7</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 62.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, h. 3

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, h. 15

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>10</sup>

Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana, yakni antara lain<sup>11</sup> :

1. Kelakuan atau akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian”.<sup>12</sup>

Ketentuan tentang perjudian dalam KUHP diatur dalam pasal 303 dan 303 *bis*, yaitu :

**Pasal 303 adalah:**

- (1) Diancam dengan pidana paling lama delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin;

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 54

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 63

<sup>12</sup> Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 69.

[berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi 25 juta rupiah]

- a. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara;
  - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu.
- (3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.<sup>13</sup>

**Pasal 303 bis adalah:**

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
  - a. barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;
  - b. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.<sup>14</sup>

**f. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.**

**Pasal 1:**

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

<sup>13</sup> R. Sugandhi, KUHP dan penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, h. 322

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 323

**Pasal 2:**

- (1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empatribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 4**

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).

**Pasal 5**

Undang-undang ini berlaku berlaku pada tanggal diundangkan.

**g. Pengertian Perjudian.**

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303.

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan

perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>15</sup>

2. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekses-ekses negatif yang lebih parah. untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.<sup>16</sup>

3. Definisi Perjudian Menurut Pakar Hukum.

§ Perjudian menurut Kartini Kartono adalah:

“Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa,

---

<sup>15</sup> *Ibid. h. 323*

<sup>16</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974

permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”.<sup>17</sup>

§ Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaanperlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.<sup>18</sup>

## 1.6. Metodologi Penelitian Hukum.

### A. Pendekatan Masalah.

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>19</sup>

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup> Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif.

### B. Sumber Data Hukum.

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hal. 56

<sup>18</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hal. 220.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.52.

<sup>20</sup> *Ibid.* h. 50.

Sumber data hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. “Data sekunder meliputi data hukum primer, data hukum sekunder, bila perlu data hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan”.<sup>21</sup>

a. Sumber Data Hukum Primer.

Data hukum primer yaitu data hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).<sup>22</sup>

Data penelitian ini terdiri dari beberapa perundang-undangan :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974.

b. Sumber Data Hukum Sekunder.

Data hukum sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan terhadap data hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).<sup>23</sup>

c. Sumber Data Hukum Tersier.

Data hukum tersier, yaitu data hukum yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai data hukum primer maupun

---

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 151.

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 82

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 82

data hukum sekunder. (contoh : Rancangan Undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).<sup>24</sup>

### **C. Metode Pengumpulan Data.**

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan melakukan studi kepustakaan yaitu penelitian yang diperoleh dengan membaca literatur yang ada kaitannya dengan tema skripsi “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”. Dalam penelitian ilmu hukum Normatif untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif dapat diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait.

### **D. Metode Analisis Data.**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini<sup>25</sup>

### **E. Sistematika Penulisan.**

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 127



Skripsi dengan judul "Efektivitas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Studi Kasus Perkara No.323/Pid.B/2010/PN.Sby.", dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Bab I, adalah merupakan pendahuluan dan di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah dan berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada kajian pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi, yang kemudian diuraikan definisi yang berkaitan dengan judul di atas. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat mutlak dalam setiap penelitian, yang intinya mengemukakan tentang jenis dan tipe penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data, dengan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II, merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah yang ada pada Bab I, yaitu: Efektivitas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jika dikaitkan dengan pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimulai dari pengertian tindak pidana perjudian , pengertian tindak pidana perjudian menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, pengertian tindak pidana perjudian menurut pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta latar belakang tindak pidana perjudian yang awalnya tindak pidana ringan bisa mengakibatkan

tindak pidana kejahatan yang meliputi faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana perjudian dan akibat yang ditimbulkan, dan pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian beserta macam-macam kejahatan dalam hal perjudian.

Bab III, berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang kedua, yaitu: penerapan sanksi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 dan pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Bab IV, mengakhiri semua pembahasan dan analisa dari keseluruhan bab sebelumnya (Bab I, II, dan III), maka pada bab ini dapat dibuat beberapa kesimpulan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan beberapa hal sebagai masukan tentang hal-hal mengenai efektivitas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 jika dikaitkan dengan pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian yang diangkat dalam penelitian ini.